

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/ TIDAK	KETERANGAN
1.	SURAT PERMOHONAN (FORMULIR.....) Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan, cap perusahaan dan bermeterai cukup (<i>permohonan diketik dan bukan tulisan tangan</i>)		
2.	SURAT KUASA DARI DIREKSI PERUSAHAAN Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, wajib melampirkan : a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang ditandatangani direksi perusahaan dan cap perusahaan, dan b. serta identitas pemberi dan penerima kuasa (<i>surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan</i>)		
3.	Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya (<i>wajib telah diunggah dalam folder perusahaan</i>)		
4.	NPWP Perusahaan (<i>wajib telah diunggah dalam folder perusahaan</i>)		
5.	Akta dan perubahannya serta pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang terdiri dari: • Akta pendirian • Akta penyesuaian UUPT (jika ada) • Akta perubahan nama (jika ada) • Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada) • Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) • Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) • Akta direksi terakhir (jika ada) (<i>wajib telah diunggah dalam folder perusahaan</i>)		
6.	Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya		
7.	Asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia		
8.	Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak		
9.	Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya		
10.	Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal		

Tanda Tangan Direksi/Pimpinan Perusahaan/Kuasa Perusahaan

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan/Tax Holiday

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN/TAX HOLIDAY
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010
 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya :
4. Instansi yang menerbitkan :
5. NPWP :
6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya :
7. Nomor dan Tanggal pengesahan Badan Hukum :
6. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBU	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1. Estimasi Mulai berproduksi :(bulan/tahun)
2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
- (nilai investasi modal tetap)*
3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
- *) *pilih salah satu*
4. Tenaga Kerja Indonesia :(orang)
- (tenaga kerja tetap)*
5. Pemasaran ekspor :%
6. Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk) :%

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT..... dengan ini menyatakan :

1. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

Catatan :
penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

LAMPIRAN :
Seluruh persyaratan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sebagaimana dimaksud pada Lampiran I

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
4	Instansi Yang Mengeluarkan	Diisi sesuai instansi yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal
5	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
8	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i>
9	Rencana Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Daerah/Lokasi diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.
10	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
12	Modal Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.
13	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
14	Pemasaran ekspor	Diisi sesuai dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

....., Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No., bertempat tinggal di; bertindak dalam kapasitasnya sebagai..... dari dan karenanya untuk dan atas nama perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara, berkedudukan di, dan beralamat di; (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

..... Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No., bertempat tinggal di,
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

.....KHUSUS.....

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk melakukan pengurusan:

.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama:
Jabatan:

.....
Nama:
Jabatan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

Bentuk Tanda Terima Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/*Tax Holiday*

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number

Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Perusahaan :
(*Company Name*)
2. Jenis Permohonan :
(*Type of Application*)
3. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)
 - a. Nama Pemohon :
(*Name of Application*)
 - b. Nomor Identitas :
(*Identity Number*)
 - c. Hubungan dengan perusahaan
(*Company Relation*)
 - d. Nomor Telepon :
(*Phone Number*)
 - e. Nomor Faksimili :
(*Fax Number*)
 - f. Alamat Pemohon :
(*Address*)

Berita Acara Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan pada tanggal

Front Officer PTSP PUSAT

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

Bentuk Berita Acara Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat
Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan
Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
Tempat :
Perihal : Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan
Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/*Tax Holiday* PT*)

Hasil Rapat :

Menyetujui melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/izin Prinsip Perubahannya Nomor
tanggal pada bidang usaha dengan catatan sebagai berikut :
.....

atau

Menolak melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.010/2015 atas nama PT..... berdasarkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahannya Nomor.....
tanggal..... pada bidang usaha dengan catatan perbaikan/alasan penolakan, sebagai berikut:
.....

Peserta Rapat

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak)
5.	Tenaga Ahli
6.	Akademisi
7.	Asosiasi

*) *Pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 159/PMK.010/2015

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT..... nomor..... tanggal..... perihal
permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dan
menindaklanjuti hasil Rapat Pengambilan Keputusan pada tanggal, dengan ini kami
mengusulkan :

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha/Proyek).....

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya :
(*nomor dan tanggal*)
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 mengingat bidang usaha PT. memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. Tanda terima berkas permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan tanggal.....
2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
4. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya;
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia;
7. Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
8. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan beserta dokumen pendukungnya;
9. Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. ;

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/*Tax Holiday*

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan usulan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015
a.n. PT.

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal..... perihal Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* atas Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perubahan No..... Tanggal....., yang telah dibahas pada rapat klarifikasi tanggal....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah :
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat klarifikasi pada tanggal antara BKPM, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Klarifikasi.
3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth. ;

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Teknis Terkait;
3. Pejabat Eselon I BKPM;
4. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI